

Peran Strategis Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Di Provinsi Riau

Syafriandi¹, Aldri Frinaldi², Hendranaldi³, Lince Magriasti⁴

¹Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia, syafriandi017@gmail.com

²Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia, aldri@fis.unp.ac.id

³Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia, hendranaldi@fis.unp.ac.id

⁴Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia, lincemagriasti@fis.unp.ac.id

Abstrak

Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggara desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa), bersama perangkat desa memiliki tanggung jawab untuk membangun desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta melakukan pembangunan infrastruktur fisik dan non fisik. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dinamika peran kepala desa dalam upaya membangun desa. Dengan metode *literature review*, artikel ini menganalisis berbagai sumber akademik, jurnal ilmiah, dan publikasi terkait untuk memahami efektivitas peran kepala desa. Pendekatan penelitian dilakukan secara sistematis dengan mengkaji literatur dari berbagai disiplin ilmu, meliputi ilmu pemerintahan, administrasi publik, pembangunan desa, serta kebijakan publik yang berkaitan dengan peran kepala desa dalam pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa memiliki peran strategis dalam penguatan pembangunan desa di Provinsi Riau melalui fungsi sebagai fasilitator, motivator, mobilisator, dan dinamisator yang mendorong partisipasi masyarakat serta optimalisasi potensi desa. Keberhasilan pembangunan desa juga dipengaruhi oleh penerapan prinsip *good governance* serta partisipasi aktif masyarakat. Namun, masih terdapat hambatan seperti keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi, dan kendala koordinasi kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan dan sejahtera.

Kata Kunci: Peran, Kepala Desa, Pembangunan Desa, *Prisma Study Flow Diagram*, *Systematic Literature Review*

Abstract

The village head serves as the chief authority in village governance based on policies formulated together with the Village Consultative Body (BPD). Assisted by village officials, the village head carries the responsibility of advancing village development, enhancing community welfare, and implementing both physical and non-physical infrastructure programs. This study seeks to explore the evolving role of village heads in promoting village development. By applying a literature review approach, the study examines a variety of academic references, scholarly journals, and relevant publications to evaluate the effectiveness of village leadership in development processes. The research was conducted systematically through an interdisciplinary review covering governance studies, public administration, rural development, and public policy concerning the role of village heads. The findings reveal that village heads hold a significant position in supporting village development in Riau Province through their roles as facilitators, motivators, mobilizers, and drivers of community engagement and village potential utilization. Furthermore, successful village development is strongly influenced by the implementation of good governance practices and active public participation. Nevertheless, several challenges remain, including limited financial resources, low levels of community involvement, and weak institutional coordination. Hence, strong collaboration between village authorities and local communities is essential in achieving sustainable and prosperous rural development.

Keywords: Role, Village Head, Village Development, Prisma Study Flow Diagram, Systematic Literature Review

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Kepala Desa memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, serta pembinaan masyarakat desa. Salah satu tanggung jawab utama kepala desa adalah mengoptimalkan pembangunan desa, karena keberhasilan pembangunan nasional sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan di tingkat desa. Dengan demikian, kepala desa memegang peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan sebagai upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa. Keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap proses pembangunan (Mufidah & Indartuti, 2022).

Di Provinsi Riau, pembangunan desa masih menghadapi berbagai persoalan, di antaranya keterbatasan infrastruktur, rendahnya partisipasi masyarakat, ketimpangan pembangunan antarwilayah, serta belum optimalnya pengelolaan potensi desa (Armansyah & Yurianto, 2022a). Kondisi tersebut menuntut adanya kepemimpinan kepala desa yang inovatif, responsif, dan adaptif agar proses pembangunan dapat berjalan secara efektif serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Eka et al., 2021). Oleh sebab itu, kepala desa tidak hanya menjalankan fungsi administratif pemerintahan, tetapi juga berperan sebagai aktor strategis dalam memperkuat pembangunan desa (Nasir, 2025).

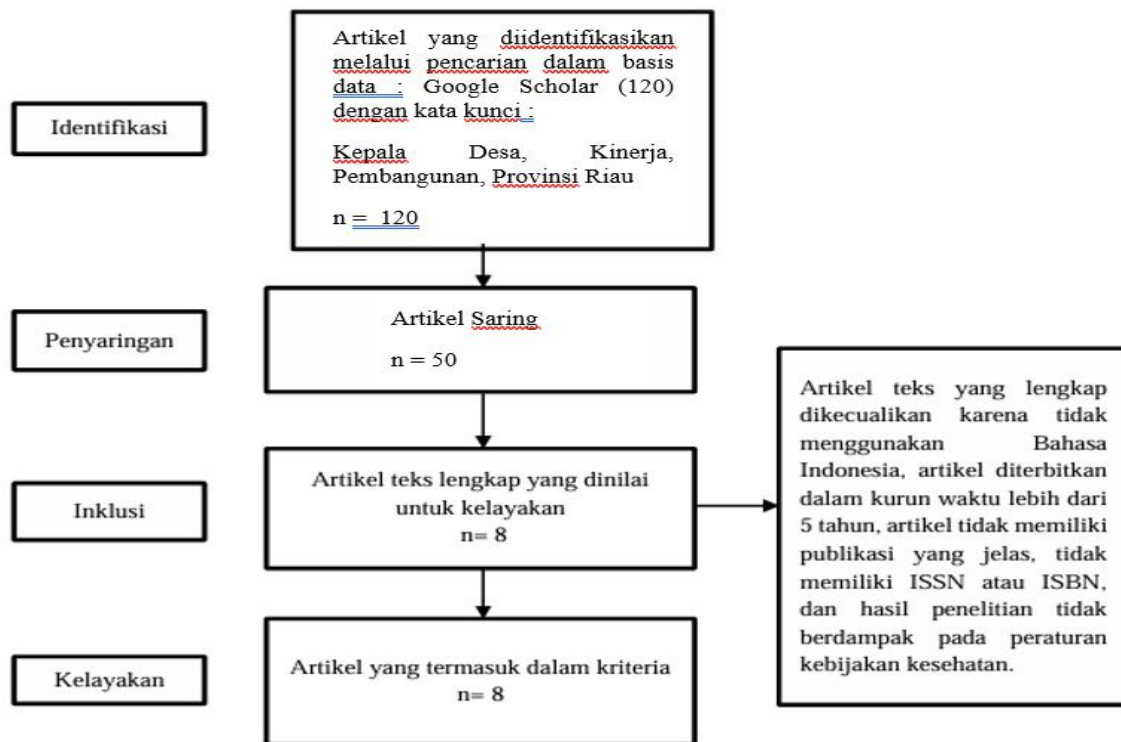
Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu proses yang mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk reorganisasi dan pembaruan sistem secara menyeluruh, baik dalam bidang ekonomi maupun sosial guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Maharani et al., 2024). Dalam konteks desa, pembangunan diarahkan pada percepatan kemajuan di berbagai sektor untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mewujudkan desa yang mandiri, maju, serta sejahtera (Anisa et al., 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara lebih mendalam peran strategis kepala desa dalam memperkuat pembangunan desa di Provinsi Riau dengan tetap memperhatikan nilai-nilai sosial, budaya, dan norma yang berkembang dalam kehidupan masyarakat desa. Artikel ini membahas bagaimana kepala desa menjalankan perannya dalam merencanakan, mengelola, serta mengarahkan pembangunan desa melalui pendekatan partisipatif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji kontribusi kepemimpinan kepala desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif, transparan, dan berkelanjutan sehingga pembangunan desa dapat terlaksana secara optimal sesuai kebutuhan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah *Systematic Literature Review* (SLR). Melalui metode ini, peneliti melakukan proses identifikasi, pengkajian, evaluasi, serta penafsiran terhadap seluruh penelitian yang telah ada sebelumnya (Algustanti, 2022). Penerapan SLR dilakukan dengan menelaah dan mengidentifikasi sumber-sumber jurnal secara satu per satu sesuai dengan tahapan, langkah, dan prosedur yang telah ditetapkan (Gozi et al., 2024).

Gambar 1. *Prisma/ Study Flow Diagram*



HASIL DAN PEMBAHASAN

Melalui pencarian studi literatur melalui google scholar, ditemukan 120 artikel dan diseleksi menjadi 50 artikel. Kemudian dari 50 artikel dieliminasi dikarenakan termasuk kriteria eksklusi sebanyak 20 artikel. Artikel yang dibatal judul dan abstraknya sebanyak 50 artikel, diadalt 42 artikel yang bukan termasuk kedalam topik pembahasannya. Artikel yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi sebanyak 8 artikel yang akan dibahas pada SLR ini.

No.	Penulis Dan Tahun	Judul Artikel	Hasil Penelitian
1.	(Armansyah & Yurianto, 2022b)	Peranan Kepala Desa dalam Pengelolaan Pembangunan Desa di Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau	Peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan desa meliputi fungsi sebagai fasilitator, mediator, motivator, dan mobilisator. Sebagai fasilitator, kepala desa berperan dalam menyediakan serta memenuhi berbagai kebutuhan yang diperlukan dalam proses pembangunan desa. Dalam menjalankan fungsi sebagai mediator, kepala desa telah mampu menjalankan perannya dengan baik dalam menciptakan hubungan yang harmonis di lingkungan pemerintahan desa. Selain itu, kepala desa juga berfungsi sebagai motivator dengan memberikan dorongan, arahan, serta dukungan kepada masyarakat maupun aparatur desa agar memiliki semangat dalam melaksanakan pembangunan. Sementara itu, sebagai mobilisator, kepala desa berperan menggerakkan dan mengajak masyarakat untuk bekerja sama serta berpartisipasi aktif dalam melaksanakan dan mengelola pembangunan desa.
2.	(Sudirman et al., 2024)	Kinerja Kepala Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	Kinerja kepala desa memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan Masyarakat yang berarti semakin baik Kinerja Kepala Desa yang dilakukan maka akan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, Koefisien determinasi dalam penelitian ini sebesar 22%. yang berarti variabilitas tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dijelaskan oleh Kinerja kepala desa sebesar 22%.
3.	(Rudiadi et al., 2021)	Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa	Kinerja pemerintahan Desa Sekeladi dalam membahas dan menyusun rencana kerja pemerintahan desa selama ini belum terlaksana dengan baik, hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kurangnya kerjasama antar lembaga pemerintahan desa, masih adanya program kerja yang tidak tepat sasaran, kurang tanggapnya pemerintahan desa dalam menyerap aspirasi dan keinginan masyarakat desa.

4.	(Alkadafi, 2018)	Analisis Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Desa (Studi Kasus Kampung Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau)	Kepemimpinan Kepala Penghulu Kampung Berumbung Baru dalam pengelolaan Kampung dapat dikatakan berhasil mewujudkan desa/kampung yang maju dan mandiri sesuai dengan tujuan otonomi desa, tipe Kepemimpinan yang inovatif-progresif diterapkan oleh kepala penghulu kampung, baik dalam kepemimpinan pelaksanaan kewenangan lokal berskala desa/kampung, kepemimpinan dalam musyawarah desa/kampung sebagai mekanisme dalam pengambilan keputusan, dimana dalam musyawarah-musyawarah yang dilaksanakan mengedepankan aspek partisipasi masyarakat, demokratis, transparansi dan akuntabilitas.
5.	(Akbar & Nazir, 2025)	Kinerja Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Air Putih, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu.	Performa Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Air Putih, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu telah menunjukkan kearah yang lebih baik. Di mana pembangunan yang dilaksanakan pemerintah desa masih sedikit jumlahnya dari jenis maupun besaran anggaran yang dialokasikan. Anggaran yang dikeluarkan pada tahun 2023 sebesar 36,5% dan tahun 2024 sebesar 28,8% dari total APBDes, sehingga penyerapan anggaran untuk pembangunan cukup sedikit. Sedikitnya jumlah pembangunan yang dilaksanakan salah satunya dikarenakan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam memberikan usulan yang sesuai kebutuhan dan kebijakan yang menjadi pedoman atau acuan, sehingga pemanfaatan anggaran desa menjadi tidak maksimal dalam pembangunan desa.
6.	(Sartika & Rohayati, 2024)	Implementasi Komunikasi Organisasi Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir, Riau	Arus komunikasi organisasi yang berlangsung di Kantor Desa Muara Basung memberikan perubahan terhadap kinerja aparat. Perubahan kinerja aparat pada aspek kedisiplinan, tanggung jawab, pelayanan dan inisiatif pegawai. Seperti datang ke kantor tepat waktu, cepat dalam menyelesaikan administrasi, pelayanan terhadap masyarakat yang cepat tanggap.

7.	(Herizal & Zulkarnaini, 2017)	Implementasi Tugas Kepala Desa dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pemandang, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu.	Pelaksanaan tugas kepala desa dalam hal pemberdayaan masyarakat di Desa Pemandang, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu tergolong masih kurang optimal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah masih belum maksimalnya sosialisasi tentang kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Kepala Desa Pemandang, kemudian untuk pelatihan dan penyuluhan yang dilakukan hanya sedikit masyarakat yang mengetahuinya. Setiap kegiatan pembangunan desa yang dilakukan Kepala Desa, tidak semua kegiatan pembangunan desa yang melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa, sehingga Lembaga Kemasyarakatan merasa kurang difungsikan oleh Kepala Desa. Serta Masih minimnya pemahaman dan pengetahuan Lembaga Kemasyarakatan Desa terkait dengan tugas dan fungsinya sebagai mitra Pemerintah Desa, hal ini disebabkan Kepala Desa Pemandang terlihat masih belum memberikan pembinaan terhadap Lembaga Kemasyarakatan Desa.
8.	(Oktari et al., 2021)	Analisis Peningkatan Kinerja Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti	Komitmen organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemerintah desa. Partisipasi masyarakat juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemerintah desa. Selain itu, kompetensi aparatur turut berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah desa.

1. Peran Strategis Kepala Desa dalam Penguatan Pembangunan Desa

Pembangunan pada dasarnya dilaksanakan untuk mewujudkan perubahan yang bersifat berkelanjutan menuju kondisi yang lebih maju dan lebih baik. Oleh karena itu, pelaksanaan fungsi kepala desa memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan desa (Elison & Hahury, 2023). Kepala desa juga memiliki peranan strategis sebagai fasilitator, motivator, dan mobilisator dalam mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa (Azzahra et al., 2025). Peran kepala desa sebagai motivator diwujudkan melalui pemberian dorongan, semangat, serta ajakan kepada masyarakat agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan desa. Kepala desa mendorong masyarakat untuk terlibat langsung dalam berbagai kegiatan pembangunan sehingga tercipta kerja sama yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat. Sebagai

fasilitator, kepala desa berperan dalam menyediakan dan mendukung fasilitas yang dibutuhkan masyarakat, terutama dalam pembangunan sarana dan prasarana seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, tempat ibadah, dan fasilitas umum lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sementara itu, peran kepala desa sebagai dinamisor tercermin dari kemampuannya menggerakkan aparatur desa dalam mengelola dan menata administrasi pemerintahan desa secara efektif, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih mudah, cepat, dan optimal (Oktari et al., 2021). Sebagai mobilisator, kepala desa mengarahkan dan menggerakkan warganya dalam menumbuhkan pembangunan desa untuk bersama-sama melakukan berbagai kegiatan Pembangunan (Holizah et al., 2025). Keberhasilan pembangunan desa tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan kepala desa dalam menyusun perencanaan dan mengelola program pembangunan, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan dalam membangun komunikasi yang efektif, mendorong keterlibatan masyarakat, mengelola dana desa secara transparan, serta menerapkan pola kepemimpinan yang mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa (Abidjulu et al., 2024). Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu unsur penting dalam pembangunan desa yang berkelanjutan karena menitikberatkan pada peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dalam menentukan serta mengarahkan proses pembangunan di lingkungannya sendiri (Nasir, 2025).

2. Kepemimpinan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa

Kepemimpinan desa merupakan kewenangan dalam mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat desa yang dijalankan oleh pemerintahan desa secara efektif, baik berdasarkan kewenangan yang telah ada maupun yang berkembang sesuai dengan kebutuhan desa serta prakarsa masyarakat desa (Subagyo et al., 2021).

Kepemimpinan desa berperan penting dalam mengarahkan pembangunan yang berkelanjutan dan menyeluruh di tingkat lokal, terutama dalam era otonomi daerah yang menempatkan desa sebagai pelaku utama pembangunan. Kepala desa tidak hanya berperan sebagai pelaksana administrasi pemerintahan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sebagai penggerak yang mampu mengoptimalkan seluruh potensi desa melalui pendekatan partisipatif. Oleh karena itu, pentingnya kompetensi kepemimpinan yang mampu menjalin hubungan dan menjembatani kepentingan antara pemerintah desa dan Masyarakat (Putra et al., 2025).

Good governance merupakan konsep penyelenggaraan pemerintahan yang kuat, akuntabel, efektif, dan efisien dengan tetap mengedepankan sinergi serta interaksi yang harmonis antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat (Erayanti et al., 2023). Penerapan tata kelola yang baik tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, tetapi juga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan potensi desa secara berkelanjutan (Fitriani et al., 2024). Dalam pelaksanaannya, kepemimpinan kepala desa memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan *good governance*. Mengingat kompleksnya tugas dan tanggung jawab kepala desa, diperlukan persyaratan khusus untuk menduduki jabatan tersebut, tidak hanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dituntut adanya kompetensi dan kemampuan dalam menjalankan tugas secara optimal (Thomassawa & Lagantondo, 2020).

Penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan berlandaskan prinsip kepastian hukum, keteraturan administrasi, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas,

efisiensi, efektivitas, serta nilai kearifan lokal, keberagaman, dan inklusivitas. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan konsep good governance dalam pemerintahan desa (Fahmi et al., 2024). Melalui penerapan tata kelola yang baik, berbagai tujuan seperti peningkatan kualitas pelayanan publik, optimalisasi pengelolaan potensi desa, kemudahan akses informasi melalui ketersediaan data, serta meningkatnya partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas dapat tercapai. Selain itu, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan melalui penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik di tingkat desa (Hidayatulloh & Purnamasari, 2023).

Implementasi good governance perlu dilakukan secara kolaboratif, bertanggung jawab, serta mengutamakan efektivitas dan efisiensi. Dengan menjunjung tinggi nilai dan prinsip tata kelola yang baik, potensi penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan dapat diminimalkan karena setiap program dirumuskan berdasarkan kesepakatan bersama (Banobel & Musryidah, 2023).

3. Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pembangunan desa mencakup empat aspek utama, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa (Uly et al., 2024). Dalam pelaksanaannya, partisipasi masyarakat menjadi modal penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan desa. Partisipasi tersebut umumnya masih didominasi oleh bentuk swadaya, gotong royong, dan kontribusi tenaga, sedangkan keterlibatan dalam bentuk ide dan gagasan masih tergolong rendah. Oleh karena itu, kepala desa bersama perangkat desa perlu memberikan dorongan serta motivasi agar masyarakat lebih aktif terlibat dalam proses pembangunan (Kaja, 2022).

Dalam konteks otonomi daerah dan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai penerima hasil pembangunan, tetapi juga memiliki peran aktif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan desa (Sujastiawan et al., 2025). Partisipasi masyarakat sendiri merupakan bentuk keterlibatan dalam proses sosial yang mencakup identifikasi masalah dan potensi lingkungan, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan program, hingga evaluasi hasil pembangunan (Sriyani & Akbar, 2025). Partisipasi tersebut juga dapat diwujudkan melalui kontribusi pemikiran, tenaga, waktu, keterampilan, maupun materi (Ginting et al., 2024).

Lebih lanjut, partisipasi masyarakat dipahami sebagai keterlibatan individu maupun kelompok dalam seluruh proses pembangunan yang mencerminkan adanya keterikatan emosional serta tanggung jawab dalam mencapai tujuan bersama (Hidayah et al., 2024). Keterlibatan masyarakat ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari musyawarah desa, penyampaian aspirasi, hingga pelaksanaan program pembangunan, serta peran kepala desa dalam mendorong pemberdayaan masyarakat agar pembangunan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan (Sari et al., 2024). Partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, karena dapat menumbuhkan rasa memiliki serta tanggung jawab terhadap hasil pembangunan yang telah dicapai (Sujianto et al., 2024).

Selain itu, pemberdayaan masyarakat tidak hanya bertujuan meningkatkan keterlibatan dalam pembangunan, tetapi juga memastikan agar hasil pembangunan seperti infrastruktur dapat dikelola dan dipelihara secara berkelanjutan. Masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap kondisi wilayahnya, termasuk permasalahan infrastruktur, potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam, sehingga keterlibatan mereka sangat penting untuk memperlancar proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Pembangunan Desa

Pembangunan menjadi media utama dalam mempercepat mobilisasi masyarakat, terutama masyarakat sebagai pribumi. Sehingga kemauan mereka sangat tinggi untuk memajukan daerahnya dengan cara ikut terlibat dalam percepatan pembangunan (Heri, 2024). Terdapat lima faktor utama yang dapat memengaruhi proses pembangunan di desa, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, kondisi ekonomi, pelayanan publik, serta partisipasi masyarakat.

Membahas berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan desa, seperti kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi, dukungan masyarakat, serta hambatan yang dihadapi kepala desa, seperti rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan anggaran, dan kurang optimalnya koordinasi kelembagaan desa (Warouw et al., 2015). Faktor utama yang mendukung pembangunan desa adalah adanya dukungan penuh masyarakat terhadap berbagai program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Namun, pembangunan desa juga menghadapi beberapa hambatan, seperti keterlambatan memperoleh alat berat dari pihak kecamatan, keterbatasan anggaran dana desa, serta tingginya harga bahan bangunan. Meskipun demikian, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan desa secara umum tergolong baik, terutama karena adanya peningkatan infrastruktur jalan yang memberikan kemudahan bagi aktivitas masyarakat (Yunita et al. 2025). Dalam pelaksanaan pembangunan desa menghadapi sejumlah faktor penghambat dan pendukung. Faktor penghambat meliputi lemahnya pendokumentasian data, keterbatasan anggaran yang belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, serta tata kelola pemerintahan desa yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, faktor pendukung pembangunan terlihat dari terjalinnya hubungan yang baik antara pemerintah desa dan BPD sehingga proses penetapan berbagai dokumen pembangunan desa, seperti RPJM Desa, Peraturan Desa tentang RKP Desa, APBDDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa dapat berjalan dengan lancar. Meskipun dalam pelaksanaannya masih ditemukan ketidakkonsistenan terhadap aturan yang berlaku, kondisi tersebut tetap mendukung kelancaran penyusunan dan pelaksanaan APBDDesa (Astika et al. 2021). Keberhasilan pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktif masyarakat setempat. Pembangunan desa merupakan seluruh bentuk usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa maupun masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat serta lingkungan desa. Upaya tersebut mencakup berbagai aspek, seperti keagamaan, pembangunan fisik, ekonomi, sosial, budaya, politik, partisipasi masyarakat, perlindungan, keamanan, hingga penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan secara terencana untuk mendorong kemajuan desa (Munawaroh & Khotimah, 2023).

Implikasi dari temuan tersebut memperkuat bahwa keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada sinergi antara kepemimpinan kepala desa, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, keterlibatan masyarakat, serta dukungan berbagai faktor

pendukung lainnya. Kepala desa sebagai aktor utama pembangunan tidak hanya dituntut memiliki kemampuan administratif, tetapi juga kemampuan kepemimpinan yang mampu menggerakkan masyarakat, membangun komunikasi yang efektif, serta mengelola sumber daya desa secara transparan dan akuntabel.

Selanjutnya partisipasi masyarakat merupakan faktor utama yang menentukan arah serta keberlanjutan pembangunan desa, karena keterlibatan aktif warga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap hasil pembangunan. Di sisi lain, penerapan prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi landasan penting untuk memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan terlaksana secara efektif, efisien, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, pembangunan desa di Provinsi Riau dapat berlangsung secara optimal apabila terdapat sinergi antara peran strategis kepala desa, penguatan kelembagaan desa, peningkatan partisipasi masyarakat, serta dukungan sumber daya yang memadai, sehingga tercipta pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) memiliki peran penting dalam mengidentifikasi, menilai, dan mensintesis berbagai hasil penelitian secara sistematis dan terstruktur. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai perkembangan suatu kajian, menemukan pola-pola temuan, serta mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang masih perlu diteliti lebih lanjut. Selain itu, SLR juga membantu meningkatkan validitas dan objektivitas kajian karena dilakukan berdasarkan prosedur yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

PENUTUP

Berdasarkan kajian literatur yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa kepala desa memiliki peran yang sangat strategis dalam memperkuat pembangunan desa di Provinsi Riau. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada fungsi administratif semata, tetapi juga mencakup peran sebagai fasilitator, motivator, mobilisator, serta dinamisator dalam mendorong partisipasi masyarakat dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki desa. Selain itu, keberhasilan pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan kepala desa dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang tercermin melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi. Penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus menciptakan pengelolaan pembangunan desa yang lebih optimal dan berkelanjutan. Selanjutnya, partisipasi serta pemberdayaan masyarakat menjadi unsur penting dalam keberhasilan pembangunan desa. Keterlibatan aktif masyarakat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan mampu menumbuhkan rasa memiliki serta tanggung jawab terhadap hasil pembangunan yang dicapai. Namun demikian, pelaksanaan pembangunan desa masih dihadapkan pada berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat di beberapa wilayah, serta permasalahan tata kelola dan koordinasi kelembagaan desa. Oleh karena itu, diperlukan adanya sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan berbagai pihak terkait lainnya untuk mengoptimalkan pembangunan desa secara berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abidjulu, R., Guampe, F., & Join, H. (2024). Peran Kepala Desa dalam Mewujudkan Pembangunan Desa yang Berkelanjutan: Sebuah Studi Literatur Kasus-kasus di Indonesia. *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 272–285. <https://doi.org/10.62383/wissen.v2i2.351>
- Akbar, M., & Nazir, Y. (2025). Kinerja Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Desa Air Putih Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu. *JMP Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, 2(1).
- Alkadafi, M. (2018). Analisis Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Desa (Studi Kasus Kampung Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau). *Jurnal El-Riyasah*, 9(2).
- Anisa, O., Risky, Z., Nur, A., & Nurdin. (2024). Dinamika Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Pintareng, Sulawesi Selatan. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 6(1). <https://doi.org/10.47134/villages.v6i1.228>
- Armansyah, & Yurianto. (2022a). Peran Kepala Desa Dalam Mengelola Pembangunan Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau. 2(8).
- Armansyah, & Yurianto. (2022b). Peran Kepala Desa Dalam Mengelola Pembangunan Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. *JIP Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(8).
- Azzahra, S., Ginting, B., Azizah, N., & Vredemika, T. (2025). Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Desa Kolam. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, 11(3), 2477–5673.
- Banobe¹, T., & Musryidah, L. (2023). Tata Kelola Pemerintah Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Desa Kalidawir Kecamatan Tanggulangin. *Inovasi Pembangunan Jurnal Kelitbangan*, 11(3), 323.
- Eka, E., Astuti, W., & Aguswan, A. (2021). Penguatan Kelembagaan Desa dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes Tahun 2021) di Kabupaten Kampar Provinsi Riau. *Journal of Election and Leadership (JOELS)*, 2(1).
- Elison, J., & Hahury, J. (2023). Implementasi Fungsi Kepala Desa Dalam Pembangunan. *Jurnal FOKUS*, 21(1).
- Erayanti, F., Basri, Y. M., & Azlina, N. (2023). Good Governance Pemerintah Desa: Apakah Dipengaruhi Standar Akuntansi Pemerintah, Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi? *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi*, 6(2). <https://doi.org/10.35837/subs.v6i2.1257>
- Fahmi, M., Anggraeny, P., & Kendry, W. (2024). Kepemimpinan Kepala Desa dalam Mewujudkan Good Governance pada Perspektif New Public Leadership di Desa Krikilan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(3), 229–245. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i3.1248>
- Fitriani, L., Kurniawan, I., Priatna, R., Gedeona, H. T., Stia, P., & Bandung, L. (2024). Penguatan Tata Kelola untuk Pembangunan Desa yang Unggul di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Strengthening Village Governance for Excellent Village Development at Paseh Sub-District Bandung Regency. *SeTIA Mengabdikan Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat e-Issn*, 5(2), 76.
- Ginting, G., Kuswandi, A., & Budiati, A. (2024). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Kandui: Faktor Pengaruh dan Tantangan. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 112–124. <https://doi.org/10.52423/neores.v6i1.1084>

- Heri, A. (2024). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)*, 4(3).
<http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh><http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>
- Herizal, A., & Zulkarnaini. (2017). Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pemandang Kecamatan Rokan Iv Koto Kabupaten Rokan Hulu. *JOM FISIP*, 4(2).
- Hidayah, H., Arpandi, & Hasbiyah, S. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Mundar Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan. *Jurnal MSDM Manajemen Sumber Daya Manusia*, 1(1).
- Hidayatulloh, R., & Purnamasari, H. (2023). Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik di Desa Karang Anyar. *The Indonesian Journal of Politics and Policy*, 5(2).
<https://journal.unsika.ac.id/index.php/IJPP>
- Holizah, U., Kurnia, D., & As, Z. (2025). Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Wangunsari Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat. *JURNLA PRAXIS IDEALIS*, 2(2). <https://doi.org/10.36859/jp.v2i2.3740>
- Kaja, L. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa. *Jurnal Fokus*, 20(2).
- Maharani, H., Ramdhan, R., & Abubakar, T. (2024). Pembangunan Desa Berkelanjutan Inovasi Kolaborasi Program Masagi Bersih. *Matra Pembaruan Jurnal Inovasi Kebijakan*, 8(2), 131–144. <https://doi.org/10.21787/mp.8.2.2024.131-144>
- Mufidah, M., & Indartuti, E. (2022). Peran Kepala Desa Peran Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Yang Partisipatif Studi Di Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 2(02).
- Munawaroh, M., & Khotimah, K. (2023). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Keberhasilan Pembangunan Desa Di Desa Sumber Ketempa Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember. *Formula Jurnal Administrasi Publik*, 2(2).
- Nasir, N. (2025). Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Cambajawaya Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar. *JMIK: Jurnal Manajemen Dan Inovasi Kewirausahaan*, 1(3).
<https://doi.org/10.64532/dj21h203>
- Oktari, V., Afifah, U., Zarefar, A., & Khoiriyah, M. (2021). Analisis Peningkatan Kinerja Pemerintah Desa Pada Desa Di Kabupaten Meranti. *CURRENT Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 2(1), 1–11. <https://current.ejournal.unri.ac.id>
- Putra, A. A., Irwansyah, & Shoalihin. (2025). Pola Kepemimpinan Kepala Desa Doromelo di Kabupaten Dompus: Studi Tentang Pendekatan Partisipatif dan Kolaboratif. *YUME: Journal of Management*, 8(3), 228–234.
- Rudiadi, Ilosa, A., & Sukri, S. (2021). Optimalisasi Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa. *Jurnal El-Riyasah*, 12(1).
- Sari, N., Parawu, H., & Taufik, A. (2024). Strategi Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa yang Berkelanjutan. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 107–121. <https://doi.org/10.26618/kjap.v10i2.15459>
- Sartika, & Rohayati. (2024). Implementasi Komunikasi Organisasi Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir, Riau. *JRMDK Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah Dan Komunikasi*, 6(1).
- Sriyani, & Akbar, M. (2025). Peran Pemerintah Desa Seponti Jaya Terhadap Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Tentang Desa. *Noblesse Oblige Law Journal*, 2(1).
- Subagyo, A., Setiawan, A., Rohayatin, T., Nurdin, L., Septiansyah, B., & Ristala, H. (2021). Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Rangka Tata Kelola Pemerintahan Di Kabupaten

- Bandung Dan Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma*, 2(1).
<https://doi.org/10.26874/jakw.v2i1.105>
- Sudirman, Tantuka, & Zainudin. (2024). Kinerja Kepala Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis (JPEB)*, 1(1).
- Sujastiawan, A., Wijaya, D., & Yamin, M. (2025). Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Di Desa Muer. *JKSAP Jurnal Kapita Selekt Administrasi Publik*, 6(1). <http://ejournalppmunsa.ac.id/index.php/ksap>
- Sujianto, As'ari, H., Gusliana, Umami, I., Habibie, D., & Putri, R. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Pengembangan Potensi Lokal di Desa Kesumbo Ampai. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 5(4).
- Thomassawa, R., & Lagantondo, H. (2020). Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Mewujudkan Good Governance Desa Sintuwulemba Kecamatan Lage Kabupaten Poso. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 15(1), 18–23.
- Uly, M., Rifai, M., & Febriantini, K. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(22), 839–846.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14577127>
- Warouw, M., Leonardus, R., & Pangemanan, A. (2015). Kajian Faktor-Faktor Dalam Proses Pembangunan Desa Di Era Otonomi Daerah Di Kecamatan Sinonsayang. *Jurnal ASE*, 11(2), 13–20.